

PRINSIP-PRINSIP DAN PRAKTIK PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS

Sulkipani

(Dosen FKIP Universitas Sriwijaya)

Abstract: *Education as a conscious and planned to produce citizens who are able to provide active participation in various aspects of life. Active participation of citizens is the concrete actualization of democratic attitude that becomes a necessity to achieve a life of social justice. Democratic citizens can be said to be a citizen who has a love of the country and is able to put the interests of the nation in a central position, as democratic attitude will show the involvement of citizens in the implementation of national and state life. Democratic citizens will certainly result from a democratic education system as well, which adhered to the principles of education, so that education applications that do focus on the formation of generations of humanity as the ultimate goal of education.*

Keywords: *Principles of Education, Democratic, Humanism*

Abstrak: Pendidikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menghasilkan warga negara yang mampu memberikan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi aktif warga negara merupakan aktualisasi konkret dari sikap demokratis yang menjadi suatu keharusan untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan sosial. Warga negara yang demokratis dapat dikatakan sebagai warga negara yang memiliki kecintaan terhadap negara dan mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara pada posisi sentral, karena sikap demokratis akan menunjukkan keterlibatan warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara yang demokratis tentunya akan dihasilkan dari sistem pendidikan yang demokratis pula, yang berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan, agar aplikasi pendidikan yang dilakukan terarah pada terbentuknya generasi yang *humanitas* sebagai tujuan akhir pendidikan.

Kata kunci: *Prinsip Pendidikan, Demokratis, Humanisme*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kepribadian dengan prinsip dan standar yang telah ditetapkan. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu

berubah, terlebih lagi pengaruh globalisasi dan westernisasi yang dikhawatirkan akan mengikis atau bahkan menghilangkan kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menggapai tercapainya visi ini, ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Dalam aplikasinya pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan

langkah-langkah secara sistematis yang dikenal dengan istilah praktik pendidikan. Agar tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan maka praktik pendidikan yang diselenggarakan harus benar-benar berbasiskan pada prinsip-prinsip pendidikan nasional. Dengan demikian, praktik pendidikan akan menjadi usaha yang mampu menghasilkan generasi-generasi akademis yang sesuai harapan bangsa yaitu generasi yang berkarakter Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai prinsip-prinsip pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan nasional Indonesia, dan praktik pendidikan untuk warga negara yang demokratis

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, artinya peneliti melakukan analisis untuk mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dihimpun. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi literatur. Teknik ini memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan analisis kritis yang mendalam (*depth critical analysis*) terhadap berbagai sumber/literatur, sehingga diperoleh yang relevan dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Pendidikan

Pendidikan sejatinya merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang optimal dari pendidikan itu sendiri. Hasil yang optimal tentunya dapat diperoleh dengan aplikasi pendidikan yang tepat sesuai dengan berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan. Menurut Prof. Dr. N. Driyarkara (dalam Abu Ahmad, dkk. 2003: 71) empat prinsip

pendidikan yaitu: *humanisme*, *humanisasi*, *humaniora* dan *humanitas*.

Berikut penjelasan ke empat prinsip tersebut.

1. Humanisme

Humanisme merupakan filsafat pendidikan, pandangan awal yang mendasari kegiatan kependidikan. Pendidikan oleh humanisme dilihat sebagai penyempurnaan diri manusia

2. Humanisasi

Humanisasi merupakan proses pendidikan. Visi dalam humanisme itu harus dicapai melalui proses yang manusiawi pula, yaitu *humanisasi*, yang dengan sendirinya mengimplikasikan *hominisasi*. “Manusia tidak hanya harus menjadi *homo* (manusia): dia juga harus menjadi *homo yang human*, artinya berkebudayaan lebih tinggi.”

3. Humaniora

Humaniora sebagai sarana menghumanisasikan pengajaran. Humaniora disini dimaksudkan dalam dua arti; yaitu *pertama*, sekumpulan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, ilmu-ilmu bahasa. *Kedua*, cara pengajaran yang mencoba *mengangkat unsur-unsur pemanusiaan dalam pengajaran*.

4. Humanitas

Humanitas dikatakan sebagai tujuan akhir pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus menerus harus disempurnakan bercirikan:

- a. Memiliki kepekaan budaya (*cultural sensibility*) yang diwujudkan dalam menghargai pluralisme dan multikulturalisme.
- b. Memperhatikan tantangan sejarah (*historically attentive*) yang terus berubah.
- c. Mampu memprakarsai berbagai terobosan dan inovasi serta menemukan makna baru dalam berbagai dimensi kehidupan (*philosophically creative*).
- d. Memiliki keunggulan akademik dan sekaligus memiliki kepedulian kepada keadilan dan ketidakadilan (*academic excellence and sensitivity to justice and injustice*).
(<http://kongrespendidikan.web.id>).

Prinsip-prinsip pendidikan yang dikemukakan Driyarkara tersebut senada dengan teori tabularasa yang dikemukakan oleh John Locke dan Francis Bacon yang mengatakan bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman yang diperolehnya (Purwanto, 2009:15-16). Artinya, dalam kependidikan seorang individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang berpengaruh dalam pembentukan perilakunya, seperti yang diungkapkan oleh Emile Durkheim (Schaeffer dalam Aziz Wahab & Sapriya, 2011:267) mengenai teori sosial. Dalam teori sosial tersebut dikatakan bahwa “*Behavior cannot be fully understood in individualistic term, that is must be understood within a larger social context*”. Hal senada juga diungkapkan

dalam teori behaviorisme yang mengatakan bahwa semua pendidikan adalah pembentukan pembiasaan, yaitu menurut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan seorang anak.

Pengalaman yang diperoleh melalui proses pendidikan merupakan sebab yang dapat memberikan akibat bagi peserta didik. Baiknya proses yang dilakukan akan berdampak positif bagi hasil yang diperoleh. Pun begitu sebaliknya.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Nasional Indonesia

Pendidikan nasional di negara Indonesia diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini dapat tercapai jika pendidikan nasional dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip atau asas-asas pendidikan yang dijadikan pedoman.

Menurut Kemendikbud, Ada lima prinsip pendidikan nasional yaitu:

prinsip demokratis berlandaskan HAM, prinsip proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat, prinsip sistemik, terbuka, multi makna dan legalitas, prinsip ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, prinsip memberdayakan masyarakat.
(<http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id>)

- a. Prinsip demokratis berlandaskan HAM

Adanya keselarasan atau keharmonisan antara pendidik dengan yang dididik, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pendidikan harus benar-benar diperhatikan. Misalnya guru mempunyai kewajiban mengajar dan siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran, guru berhak untuk memberikan tugas dan siswa berkewajiban mengerjakan tugas tersebut.

b. Prinsip proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat,

Pendidikan adalah suatu proses pewarisan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat antargenerasi. Hasil budaya yang berupa tulisan dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dalam masyarakat berbudaya tulis sumber belajar selain tatap muka dalam pergaulan juga lewat tulisan dan lembaga pendidikan yang diusahakan secara formal. Proses belajar dapat terjadi di mana saja sepanjang hayat.

Sekolah merupakan salah satu tempat proses belajar terjadi. Sekolah merupakan tempat kebudayaan, karena pada dasarnya proses belajar merupakan proses pembudayaan. Dalam hal ini, proses pembudayaan di sekolah adalah untuk pencapaian akademik siswa, untuk membudayakan sikap, pengetahuan, keterampilan dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas budaya, serta untuk mengembangkan budaya dalam suatu komunitas melalui pencapaian akademik siswa. Proses pembudayaan terjadi dalam bentuk pewarisan tradisi budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya, dan adopsi tradisi budaya oleh orang yang belum mengetahui budaya tersebut sebelumnya.

c. Prinsip sistemik, terbuka, multihak dan legalitas

Maksud prinsip sistemik adalah pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak komponen yang terorganisir yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan seperti komponen tujuan, siswa, pendidik, lingkungan pendidikan, metode. Terbuka artinya pendidikan harus dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia untuk semua jenjang pendidikan, dan merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Multihak mengandung pengertian bahwa pendidikan nasional dilakukan dengan

mengembangkan berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek legalitas artinya bahwa pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada

d. *Prinsiping ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*

Pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodho, artinya dari depan guru dapat memberikan contoh. Kemudian Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya dari tengah dapat membangun keinginan siswa untuk bertindak. Terakhir Tut Wuri Handayani, yang berarti dari belakang dapat memberikan dorongan.

e. Prinsip memberdayakan masyarakat

Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai proses yang dapat memberdayakan manusia. Bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab secara bersama-sama dengan masyarakat. Dalam pendidikan adanya proses pembelajaran yang dapat membantu orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, orang yang sebelumnya tidak terampil, kemudian dengan adanya proses pendidikan akan menjadi terampil. Sehingga ia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan atau hambatan yang dihadapinya.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pendidikan

Apabila pendidikan yang dilaksanakan ingin mewujudkan warga negara yang demokratis, maka proses pendidikan yang dilaksanakan pun harus berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

- sesuai dengan nilai-nilai luhurnya;
2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur;
 3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. (Hasbullah, 2008:249).

Berdasarkan prinsip demokratis pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa proses yang dilaksanakan akan berkorelasi dengan hasil akhir, yaitu warga negara yang demokratis. Tentu saja jika semua komponen yang terkait dalam pendidikan tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin.

Praktik Pendidikan Untuk Warga Negara yang Demokratis

Praktik pendidikan dilakukan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: jalur formal, nonformal, dan informal (Pidarta, 2007:20). Ketiga lembaga pendidikan tersebut dapat dibedakan berdasarkan orientasi pendidikannya. Apabila pendidikan jalur formal berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, maka pendidikan jalur nonformal dan informal mengutamakan pengembangan afeksi dan psikomotor yang menempatkan kognisi sebagai unsur penunjang.

Dalam kegiatan pendidikan pada jalur formal ditemukan unsur-unsur berupa

pendidik, terdidik, tujuan, isi pendidikan, dan interaksi, baik interaksi antara pendidik dengan terdidik, maupun antara terdidik dengan terdidik yang disusun secara sistematis. Pada jalur ini, pendidikan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tersusun secara ketat yang diselenggarakan di sekolah dan perguruan tinggi. Adanya tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh oleh peserta didik sebelum menyelesaikan pendidikan pada tingkatan sekolah atau perguruan tinggi.

Pendidikan formal dilaksanakan dengan orientasi mewujudkan manusia seutuhnya, yang di dalamnya juga terdapat unsur mewujudkan masyarakat yang demokrasi, yaitu masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta adil dalam setiap tindakan. Agar orientasi mewujudkan manusia seutuhnya tersebut dapat tercapai, maka praktik pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan.

Disamping pendidikan pada jalur formal, praktik pendidikan juga berlangsung pada jalur nonformal dan informal. Pada jalur nonformal juga terdapat unsur-unsur pendidikan seperti pada jalur formal, namun pada jalur nonformal ketentuan pelaksanaan lebih longgar, dalam artian disesuaikan dengan masing-masing lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan nonformal juga harus dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, antara lain memberikan perlakuan yang sama dengan setiap siswa tanpa adanya unsur diskriminatif. Agar setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Sehingga mereka memiliki keterampilan hidup (*life skill*) yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat demokratis, karena kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi sikap demokratis seseorang. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, proses yang baik tentunya akan berpengaruh baik pula

pada hasil. Dengan kata lain, demokratis yang diterapkan dalam pendidikan dapat mewujudkan warga negara yang demokratis.

Lembaga pendidikan yang terakhir adalah pendidikan pada jalur informal, yang belangsung pada lingkungan primer yaitu keluarga. Keluarga merupakan peletak dasar nilai-nilai pendidikan pada anak. Dalam praktiknya, pendidikan pada jalur ini tidak ditemukan unsur pendidik dan terdidik, kemudian juga setiap keluarga bisa saja menerapkan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Sistem yang diselenggarakan pun tidak berdasarkan pada aturan yang baku. Namun, untuk mewujudkan warga negara yang demokratis, pendidikan jalur informal tidak bisa diabaikan atau disepelekan. Nilai-nilai demokrasi yang diharapkan dimiliki oleh setiap anak, pada dasarnya bisa ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga.

Fenomena yang ada dalam masyarakat, ketika seorang anak tidak merefleksikan perilaku demokratis dalam tindakannya di lingkungan luar sekolah, sekolah pun menjadi sasarannya. Sekolah dianggap tidak konsisten terhadap prinsip-prinsip pendidikan yang mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis. Padahal, disadari atau tidak terkadang keluarga belum menyediakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi anak untuk mengembangkan sikap demokratis, seperti tindakan tidak jujur, dan lain-lain. Kedengarannya sangat sederhana, namun hal tersebut dapat mempengaruhi karakter anak dalam proses pembelajarannya menuju manusia yang demokratis. Karakter warga negara yang demokratis yang tidak tertulis secara baku dalam lingkungan keluarga dapat membentuk sikap demokratis pada anak. Dengan kata lain, keluarga yang demokratis akan membentuk anak yang demokratis pula.

Keluarga sebagai peletak dasar nilai-nilai demokratis pada anak, harus benar-benar memainkan perannya sebagai aktor utama

dalam menumbuhkembangkan sikap demokratis pada anak. Lembaga pendidikan nonformal diharapkan menjadi lembaga yang mampu mendorong anak dalam mengembangkan keterampilan hidup. Kemudian lembaga pendidikan formal dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang tersusun sistematis agar dapat mewujudkan manusia seutuhnya yang demokratis, tentu saja tanpa mengabaikan peran dan fungsi dari setiap komponen yang terlibat pada setiap jalur pendidikan. Artinya, semua komponen pendidikan dapat menjalankan tugasnya masing-masing sehingga dapat menghasilkan “hasil pendidikan” yang demokratis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara ketiga lembaga pendidikan tersebut. Baik lembaga pendidikan formal, nonformal, maupun informal mempunyai andil besar dalam mewujudkan warga negara yang demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Pelajaran Pembentuk dan Pengembang Sikap Demokratis Peserta Didik

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan bahwa salah satu dari tiga jalur pendidikan adalah jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di tingkat satuan sekolah dan perguruan tinggi. Pada jalur formal, praktik pendidikan diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian kurikulum dijadikan sebagai acuan dalam praktik pembelajaran yang memuat segala komponen yang berkaitan dengan praktik kependidikan. Salah satu komponen dalam yang dikembangkan dalam kurikulum adalah komponen mata pelajaran dalam satuan isi.

Salah satu mata pelajaran yang menjadi bagian dalam kurikulum formal adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*). Mata

pelajaran pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang dijadikan sebagai motor dalam pembentukan karakter warga negara, disamping mata pelajaran lainnya. Negara-negara di dunia mengembangkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) dalam kurikulum pendidikan formal untuk membentuk karkter warga negara yang diharapkan.

Civic Education adalah mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan tentang hal-hal yang menyangkut kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis (Aziz Wahab & Sapriya, 2011:37). Baik pada tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas maupun pada tingkat perguruan tinggi mata pelajaran PKn dijadikan sebagai mata pelajaran yang bertujuan menumbuh kembangkan sikap warga negara yang baik, dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban serta menjadi warga negara yang demokratis.

Selanjutnya mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan beberapa ahli memberikan penjelasannya. Robinson (dalam Aziz Wahab & Sapriya, 2011:314) menerangkan salah satu dari tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah *Development of democratic principles and application to daily life*. Kemudian dalam ruang lingkup negara Indonesia, Aziz Wahab & Sapriya (2011:315) menjelaskan bahwa “tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan salah satunya yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.”

Berdasarkan pengertian dan tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan

(*Civic Education*) tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari kurikulum formal yang mempunyai andil besar dalam menumbuh kembangkan sikap kewarganegaraan pada peserta didik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan, maka praktik pendidikan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip yang ada, sehingga usaha praktik pendidikan merupakan kegiatan terarah yang dapat menghasilkan generasi-generasi yang sesuai dengan tuntutan dalam tujuan pendidikan yang dicita-citakan untuk mewujudkan manusia seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu dan Nur Uhbiyati. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta;
- Hasbullah. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Purwanto, Ngalim. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta

<http://kongrespendidikan.web.id>, diakses tanggal 13 September 2012;

<http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id>, diakses
tanggal 13 September 2012.